

**PENGARUH KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMODERASI
DENGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL
DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH**

**Studi pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah**

¹⁾ Enita Binawati ²⁾ Eni Dwi Susliyanti

email: ¹⁾ enitabinawati@gmail.com ²⁾ eni.susliyanti@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta

Abstraction

The development of government accounting in Indonesia has undergone many changes since the issuance of Law No.17 of 2003 concerning state finances. Government or state financial reports must be presented according to transparent and accountable Government Accounting Standards (SAP). Government or state financial reporting, previously based on cash and now on accrual basis. The implementation of accrual-based accounting system regulations can be influenced by various factors, including the quality of information technology, human resource competence and others. The application of accrual-based financial reporting is expected to produce quality government or state financial reports that support the achievement of the Indonesian government's goals.

The purpose of this study is to empirically examine the effect of information technology quality, human resource competence on the application of accrual-based SAP and government financial accounting systems and their effects on the quality of financial reports. The research was conducted at the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing in the DIY Central Java Region, to be precise at the VII National Road Implementation Center. The method used in this research is mix methods. The method stages are 1). quantitative method by distributing questionnaires to the respondents and continued 2). qualitative method, namely by interviewing the respondents. The analysis tool is Partial Least Square (PLS). The target output of this research is in the form of articles published in national journals and producing reference books. TKT in this study is to evaluate the implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Government Financial Statements using mix methods.

The quantitative research results prove that 1). empirically the application of accrual-based SAP is influenced by the quality of human resources but not the quality of information technology, 2). the application of the government financial accounting system is empirically influenced by the quality of information technology but not by the quality of human resources, and 3). The quality of financial statements is empirically influenced by the government financial accounting system but not influenced by the accrual-based SAP application. The quantitative results are in line with the qualitative results which show that the financial reports prepared at the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing of the DIY Central Java Region, to be precise at the VII National Road Implementation Center, are classified as high quality because the financial reports are compiled correctly according to with Government Accounting Standards (SAP) and applicable principles, namely General Accepted Accounting Principles (PABU). The accounting recording system has been prepared following Government Regulations with an Accrual-based recording system and has been running well, although there are still some obstacles due to differences of opinion and understanding in the process of preparing financial statements.

Keywords: *Government Accounting Standards (SAP), Accrual Basis, Financial Accounting Systems, Financial Statements, Mixed Methods, PLS*

Abstraksi

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Laporan keuangan pemerintah atau negara harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan pemerintah atau negara, dahulunya berbasis kas dan sekarang berbasis akrual. Pelaksanaan regulasi sistem akuntansi berbasis akrual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari kualitas teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan lainnya. Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual diharapkan akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah atau negarayang berkualitas sehingga mendukung pencapaian tujuan pemerintah Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara empiris menguji pengaruh kualitas teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah, tepatnya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods* (metode campuran). Tahapan metodenya yaitu 1). metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para responden dan dilanjutkan 2). metode kualitatif yaitu dengan wawancara pada para responden. Alat analisisnya *Partial Least Square* (PLS). Adapun target luaran dari penelitian ini berupa artikel yang terpublish dalam jurnal nasional dan menghasilkan buku referensi. TKT dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan *mix methods*.

Hasil penelitian secara kuantitatif membuktikan bahwa 1). secara empiris penerapan SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia tetapi tidak dipengaruhi kualitas teknologi informasi, 2). penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah secara empiris dipengaruhi oleh kualitas teknologi informasi tetapi tidak dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dan 3). Kualitas laporan keuangan secara empiris dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah tetapi tidak dipengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. Hasil secara kuantitatif sejalan dengan hasil secara kualitatif yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah, tepatnya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, sudah tergolong berkualitas karena laporan keuangan disusun secara benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Prinsip-Prinsip yang berlaku yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sistem pencatatan akuntansi telah disusun mengikuti Peraturan Pemerintah dengan sistem pencatatan berbasis Akrual dan telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat sedikit kendala karena perbedaan pendapat dan pemahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akrual Basis, Sistem Akuntansi Keuangan, Laporan Keuangan, Metoda Campuran, PLS

PENDAHULUAN

Sejak masa reformasi, sistem pemerintahan dan pembangunan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Tuntutan publik yang menguat mendorong Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan khususnya dalam sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP melahirkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dikelola secara transparan dan akuntabel guna menciptakan *good governance*. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara khususnya pasal 32 juga menjelaskan bahwa isi dan bentuk laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP dalam PP 71 Tahun 2010 mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berbasis akrual. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap Pemerintah Pusat/ Daerah dalam sistem pencatatan akuntansi laporan keuangan sudah tidak menggunakan basis kas tetapi berbasis akrual selambat-lambatnya tahun 2015.

Pelaksanaan atas perubahan regulasi sistem akuntansi berbasis kas menjadi akrual, membutuhkan kesiapan pemerintah yang cukup tinggi. Berhasil atau tidaknya penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sistem pelaporan keuangan tergantung dari kesiapan organisasi pemerintah itu sendiri. Kesiapan pemerintah dapat ditunjukkan dari faktor kualitas teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Organisasi pemerintah yang siap maka akan mendukung regulasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian yang diangkat adalah "Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang Dimoderasi dengan Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Studi pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah".

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

- 1) Apakah kualitas teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah?
- 2) Apakah Penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

- 3) Bagaimana Penerapan SAP berbasis akrual, sistem akuntansi keuangan pemerintah, dan kualitas laporan keuangan?

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a) Menguji secara empiris pengaruh kualitas teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah.
- b) Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
- c) Untuk mengetahui penerapan SAP berbasis akrual, dan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pentingnya penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat berkontribusi dalam keilmuan Akuntansi Sektor Publik.
- 2) Penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penerapan SAP berbasis akrual, sistem akuntansi keuangan pemerintah serta tingkat kualitas laporan keuangan yang sudah berjalan selama ini.
- 3) Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan regulasi pemerintah khususnya UU No.17 Tahun 2003, PP No. 71 Tahun 2010.

PENGEMBANGAN TEORI DAN HIPOTESIS

Laporan keuangan merupakan laporan wajib yang harus dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh setiap organisasi sektor publik. Laporan keuangan pemerintah harus dikelola secara transparan dan akuntabel guna menciptakan *good governance*, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Laporan keuangan yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa bentuk dan isi laporan keuangan pemerintah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pembuatan laporan keuangan pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat harus mengacu pada SAP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan sistem akuntansi keuangan di pemerintahan dari kas menjadi akrual yang tergolong tidak mudah karena membutuhkan kesiapan dari berbagai faktor, Pemerintah menjembatani dengan mengeluarkan PP No.24 Tahun 2005. Peraturan tersebut berisi pelaporan keuangan pemerintah menggunakan sistem akuntansi keuangan berbasis kas menuju akrual sebelum menerapkan secara murni sistem akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan menerapkan SAP berbasis akrual, seperti kualitas teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Teknologi informasi mempunyai nilai fungsi yang sangat tinggi bagi organisasi khususnya pemerintah sehingga tercipta efisiensi efektivitas.

Sumber daya manusia (SDM) mencakup tiga aspek diantaranya adalah aspek pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP. Semakin tinggi ketiga aspek ini dimiliki oleh SDM maka semakin tinggi kompetensi SDM tersebut. Ketersediaan SDM yang kompeten akan mendukung penerapan SAP berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan.

Penerapan regulasi pemerintah mengenai sistem pencatatan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual* yang masih tergolong baru di Indonesia dan kualitas laporan keuangan yang senantiasa diperbaiki setiap tahunnya, maka masih terbatas pula penelitian yang mengangkat topik ini dan perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi. Beberapa penelitian sebelum yang meneliti dengan topik tersebut, diantaranya adalah Kusumo Ramadhani (2013), Adventana dan Kurniawan (2014), Sudiarianti (2015), Yudha Kusuma (2013) dan Marsdenia dan Mutiha (2016).

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan pernah diteliti oleh Kusumo Ramadhani (2013), Sudiarianti (2015). Kusumo Ramadhani (2013) meneliti dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Pemda, Studi pada SKPD Kabupaten Bantul. Menggunakan alat uji SPSS menghasilkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh penerapan SAP dan sistem akuntansi keuangan daerah. Adapun kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Sudiarianti (2015) meneliti mengenai pengaruh Kompetensi SDM pada Penerapan SPI Pemerintah dan SAP pada kualitas Laporan keuangan Pemda. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap SPI Pemerintah dan SAP, dan penerapan SPI Pemerintah serta SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual pernah diteliti oleh Yudha Kusuma (2013) dan Adventana dan Kurniawan (2014). Penelitian Yudha Kusuma (2013) meneliti dengan judul faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah. Dengan pengujian SPSS menghasilkan bahwa pelatihan staf keuangan berpengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual, sedangkan tingkat pendidikan, kualitas teknologi informasi dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adventana dan Kurniawan (2014) bahwa SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, sedangkan teknologi informasi dan tata cara komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Marsdenia dan Mutiha (2016) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, studi empiris pada Pemerintahan Bogor. Pengujian kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda menghasilkan bahwa komitmen organisasi dan komunikasi terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual sedangkan faktor SDM dan sarana pendukung tidak berpengaruh.

Berdasarkan regulasi dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti mencoba mengembangkan dan mengkombinasikan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lingkup Pemerintahan Kementerian menggunakan metode campuran dan alat analisis Partial Least Square (PLS). Berikut hipotesis dan model yang dibangun dalam penelitian ini:

- H1a : Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Penerapan SAP berbasis akrual
- H1b : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Penerapan SAP berbasis akrual
- H2a : Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Sistem akuntansi keuangan pemerintah
- H2b : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Sistem akuntansi keuangan pemerintah
- H3 : Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan
- H4 : Sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan

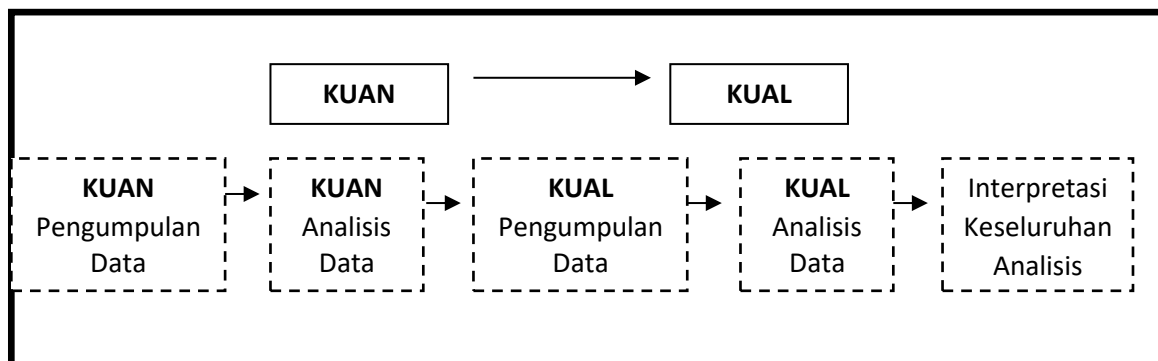
METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *mixs method* (metode campuran) dengan strategi *eksplanatoris sekuensial*. Creswell (2010:5) mendefinisikan metode campuran sebagai pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.

Pendekatan *mix method* lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data tetapi juga melibatkan fungsi dari kedua pendekatan sehingga secara keseluruhan mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian kuantitatif ataupun kualitatif (Creswell dan Plano Clark; dalam Creswell, 2010:5)).

Menurut Creswell (2010:5) penelitian kuantitatif merupakan metoda-metoda yang menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antarvariabel. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metoda-metoda untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini memilih menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial (*sequensial explanatory strategy*). Strategi *eksplanatoris sekuensial* digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil-hasil kuantitatif berdasarkan pengumpulan dan analisis data kualitatif (Creswell, 2010). Strategi eksplanatoris sekuensial dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif yang kemudian mengumpulkan data kualitatif dan dilanjutkan dengan menjelaskan atau menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya. Berikut tahapan strategi eksplanatoris sekuensial:

Strategi Eksplanatoris Sekuensial



Sumber: Creswell (2010:314)

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih sampel sesuai kriteria yang sudah ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Sampel dalam penelitian adalah Staf Keuangan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan survei kuesioner dan wawancara secara langsung yang disebarkan oleh peneliti kepada para responden.

Peneliti menggunakan alat analisis *Partial Least Square (PLS)* untuk menguji hipotesis. Jogiyanto dan Abdillah (2009:11) menjelaskan bahwa PLS merupakan salah satu metoda statistika *Structural Equation Model (SEM)* berbasis varians yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel yang kecil atau adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas. Data kuantitatif diperoleh dari

kuesioner yang diberikan kepada para responden yang kemudian dianalisis menggunakan analisis *Partial Least Square (PLS)*. PLS dapat menguji model pengukuran dengan menunjukkan adanya hubungan antara indikator-indikator yang digunakan dengan variabel atau konstruk. Hasil dari pengujian model pengukuran dapat membentuk diagram jalur yang menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel. Pengukuran model dapat diukur dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas suatu model.

Pengujian validitas menurut Chin dalam Jogiyanto dan Abdillah, (2009:61) menunjukkan bahwa nilai validitas konvergen suatu konstruk dapat dilihat dari faktor loading dengan *rule of thumb* lebih dari 0,7 dan *rule of thumb* lebih dari 0,5 juga masih dapat diterima (Hair dkk, 2010). Untuk uji reliabilitas, Jogiyanto dan Abdillah (2009:81) menyatakan bahwa suatu konstruk dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach's alpha* harus $> 0,6$ dan nilai *Composite reliability* harus $> 0,7$. Adapun pengujian hipotesis, untuk memprediksi hubungan kausalitas dari proses *bootstrap* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *T-table* dengan *T-statistic*. Nilai *T-table* yang lebih rendah daripada *T-statistic* pada tingkat keyakinan tertentu maka menunjukkan hipotesis penelitian terdukung. Hair dkk; dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009), mengungkapkan bahwa nilai *T-table* untuk pengujian hipotesis adalah $\geq 1,64$ pada tingkat keyakinan 95 persen (alpha 5 persen).

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah, tepatnya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII yang terdiri atas 6 Satuan Kerja (Satker) dan 30 PPK dengan responden penelitian adalah pegawai bagian keuangan. Kriteria sampel dalam penelitian adalah pegawai bagian keuangan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, berkerja minimal satu tahun, pernah terlibat dalam penyusunan /perencanaan anggaran dan atau membuat laporan keuangan.

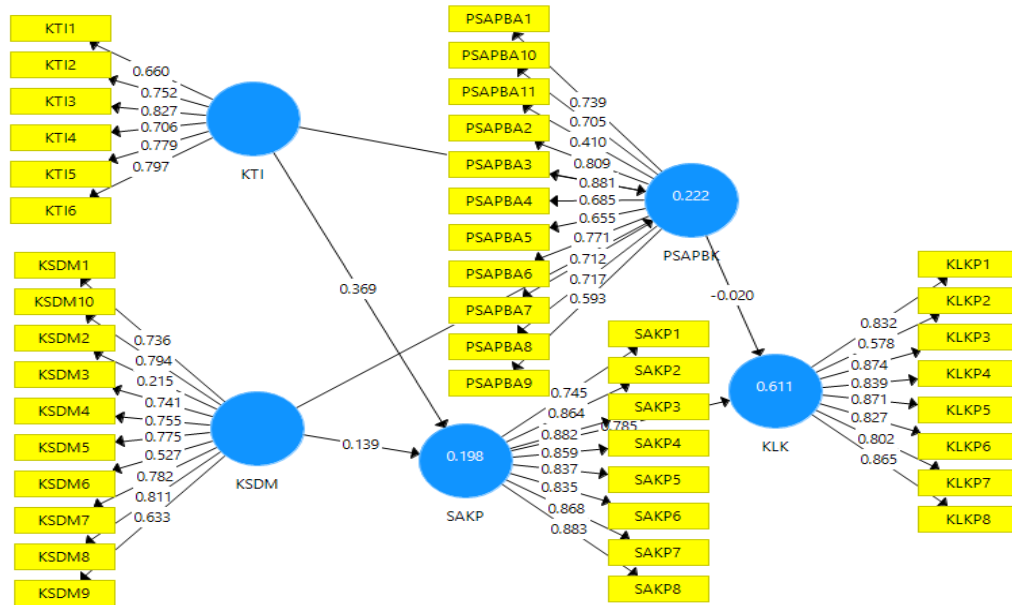
Pengumpulan data responden dilakukan secara bertahap dengan menggunakan dua metoda, yaitu perijinan pengumpulan data kuantitatif secara kuantitatif dilakukan sejak bulan Februari s.d Maret 2020 dengan memasukkan dan membagikan kuesioner penelitian secara langsung ke Satker-Satker dan PPK di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun untuk memperoleh data kualitatif, yang seharusnya dilakukan dengan proses wawancara secara langsung dengan para responden, mengingat sejak akhir Maret s.d April 2020 mulai banyak perubahan aturan pelayanan yang sangat dibatasi karena Wabah Pandemi Covid -19 menjadikan pengumpulan data kualitatif menjadi terhambat. Pengumpulan data kualitatif baru kemudian dilakukan pada Mei s.d Juni 2020 diperoleh

dengan melakukan wawancara melalui direct email dengan beberapa responden di yang dipilih secara random/ mewakili.

Analisis Data Kuantitatif

Diagram jalur hasil analisis (iterasi algoritma PLS) dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut:

Gambar Diagram Jalur Hasil Analisis (Iterasi Algoritma PLS)



Sumber: Output Smart PLS ver. 2.0 Tahun 2020

Berikut ini disajikan hasil analisis model pengukuran (analisis jalur) dengan menggunakan iterasi algoritma PLS dalam tabel, yaitu

Tabel Overview Iterasi Algoritma PLS

Variabel	Validity Test		Reliability Test		R Square
	AVE	Communality	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	
KSDM	0.488	0.900	0.900	0.873	
KTI	0.571	0.859	0.888	0.850	
PSAPBK	0.501	0.929	0.915	0.898	0.222
SAKP	0.719	0.951	0.953	0.944	0.198
KLK	0.666	0.939	0.940	0.926	0.611

Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 tahun 2020

Uji Validitas

Parameter uji validitas dapat dilihat dari skor AVE dan *Communality*. Skor masing - masing bernilai diatas 0,5 yang berarti bahwa probabilitas indikator kontruk masuk ke konstruk lain menjadi lebih

rendah karena kurang dari 0,5 sehingga probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang lebih besar yaitu diatas 0,5. Hasil uji validitas dari tabel menunjukkan bahwa keempat konstruk mempunyai nilai diatas 0,5 yaitu KTI (0,571), PSAPBK (0,501), SAKP (0,719), dan KLIK (0,666), sedangkan untuk konstruk KSDM nilainya 0,488 dibawah 0,5. Namun walaupun demikian skor AVE yang dimiliki konstruk KSDM (0,448) yang menunjukkan lebih rendah dari skor ideal AVE dengan probabilitas sebesar 0,5; hal ini masih dapat ditoleransi menurut Lai dan Fan, 2008; Vinzi dkk., 2010 (dalam Wijaya dan Akbar, 2012) yang menyatakan skor 0.4 masih ditoleransi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

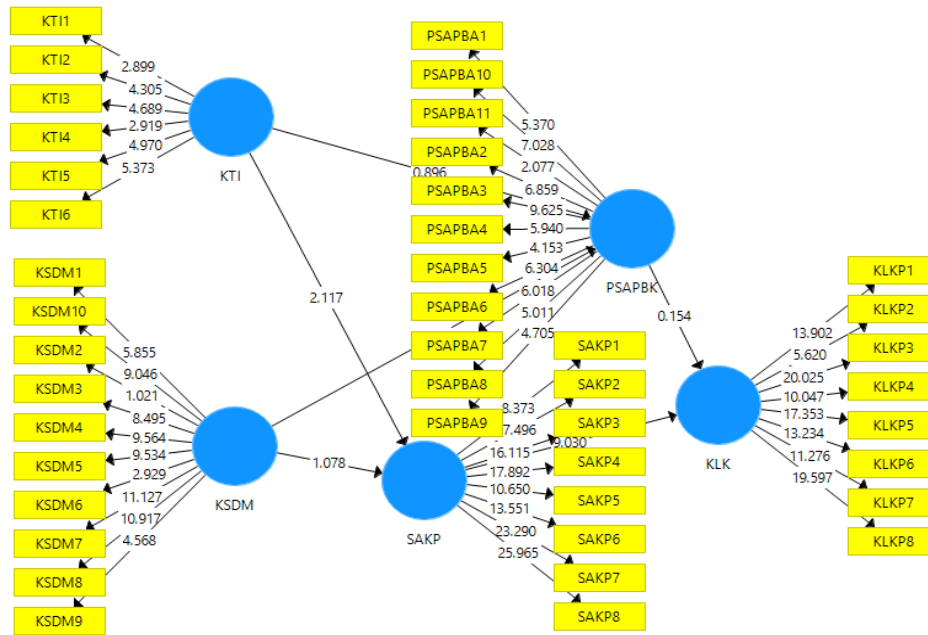
Uji Reliabilitas

Parameter uji reliabilitas dapat dilihat dari skor *composite reliability* dan *cronbachs alpha* dengan syarat minimal nilainya $\geq 0,6$ (Hair dkk, 2006 dalam Hartono, 2009). Dari tabel dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dinyatakan reliabel karena telah memenuhi skor *composite reliability* dan *cronbachs alpha* $\geq 0,6$. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai *composite reliability* dengan konstruk KSDM (0.900), KTI (0.888), PSAPBK (0.915), SAKP (0.953), dan KLIK (0.940), serta dapat dilihat juga nilai *cronbachs alphanya* pada konstruk KSDM (0.873), KTI (0.850), PSAPBK (0.898), SAKP (0.944), dan KLIK (0.926). Berdasarkan evaluasi model pengukuran dengan terpenuhinya kriteria uji validitas dan uji reliabilitas, maka secara keseluruhan instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengukur keterdukungan hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian model struktural dengan memakai fungsi *Bootstraping* dalam PLS.

Gambar Diagram *Bootstrapping* – Evaluasi Model Struktural



Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 Tahun 2020

Dari proses *Bootstrapping* yang dilakukan seperti gambar, menghasilkan koefisien jalur yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Koefisien Jalur (Mean, STDEV, T-Values)

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	P-Value	T-Statistics (O/STERR)
KTI → PSAPBK	-0.166	-0.130	0.186	0.371	0.896
KSDM → PSAPBK	0.516	0.527	0.151	0.001	3.422
KTI → SAKP	0.369	0.354	0.174	0.035	2.117
KSDM → SAKP	0.139	0.190	0.129	0.282	1.078
PSAPBK → KLK	-0.020	-0.012	0.132	0.878	0.154
SAKP → KLK	0.785	0.778	0.087	0.000	9.030

Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 tahun 2020

Penelitian ini mengajukan 6 (lima) hipotesis. Kelima hipotesis tersebut terdiri dari H1a, H1b, H2a, H2b, H3, dan H4. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan PLS, yang dapat dilihat pada tabel diatas. Berikut analisis terhadap hasil pengujian hipotesis, adalah:

H1a: Kualitas Terknologi Informasi berpengaruh terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,896 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$

(T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y_1) -0,166. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1a pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H1b: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi SDM terhadap penerapan SAP berbasis akrual yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,422 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y_1) 0,516. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1b pada penelitian ini terdukung secara empiris (dapat diterima).

H2a: Kualitas Terknologi Informasi berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas teknologi informasi terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 2,117 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y_1) 0,369. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2a pada penelitian ini terdukung secara empiris (dapat diterima).

H2b: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi SDM terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 1,078 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y_1) 0,139. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2b pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H3: Penerapan SAP Berbasis Akrual Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,154 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y_1) -0,020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H4: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang

ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 9,030 yang sangat memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y_1) 0,785. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 pada penelitian ini terdukung secara empiris (dapat diterima).

Berikut kesimpulan hasil pengujian hipotesis, yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Tanda	Koefisien Jalur	T-Statistik	Hasil
H1a	KTI → PSAPBK	-	-0.166	0.896	Tidak Terdukung
H1b	KSDM → PSAPBK	+	0.516	3.422	Terdukung
H2a	KTI → SAKP	+	0.369	2.117	Terdukung
H2b	KSDM → SAKP	-	0.139	1.078	Tidak Terdukung
H3	PSAPBK → KLK	-	-0.020	0.154	Tidak Terdukung
H4	SAKP → KLK	+	0.785	9.030	Terdukung

Analisis Hasil dari Pengujian Hipotesis

1. Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Penerapan SAP berbasis aktual

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H1a) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa faktor kualitas teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis aktual. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudha Kusuma (2013) serat Adventana dan Kurniawan (2014) yang menunjukkan hasil bahwa keduanya juga membuktikan bahwa kualitas teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis aktual. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas dan kualitas teknologi informasi yang disediakan dikantor dan kemudian digunakan dalam menunjang kegiatan yang ada, hal ini tidak berpengaruh dalam penerapan SAP berbasis aktual. Tidak berpengaruhnya kualitas teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis aktual bisa disebabkan karena beberapa kondisi, seperti halnya SDM yang belum dapat beradaptasi dan menggunakan fasilitas teknologi informasi secara maksimal atau masih kurangnya pelatihan IT kepada para pegawai.

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Penerapan SAP berbasis aktual

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H1b) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini konsisten atau mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adventana dan Kurniawan (2014) dan tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marsdenia dan Mutiha (2016). Hasil penelitian Adventana dan Kurniawan (2014) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual, sedangkan penelitian Marsdenia dan Mutiha (2016) menunjukkan berpengaruh negatif.

3. Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H2a) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas dan kualitas teknologi informasi yang disediakan dikantor dan kemudian digunakan oleh para pegawai akan menunjang penerapan sistem akuntansi keuangan di pemerintah.

4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H2b) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

5. Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H3) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Jika dilihat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kusumo Ramadani (2013) dan Sudiarianti (2015), menunjukkan hasil bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh penerapan SAP berbasis akrual, artinya bahwa SAP berbasis akrual tidak menjamin bahwa laporan keuangan lebih berkualitas, ataupun jika dibandingkan dengan berbasis kas. Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat dilihat dengan basis akrual saja dalam penerapan SAP, tetapi bisa jadi terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah seperti halnya penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

6. Sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H4) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten atau mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumo Ramadani (2013) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Analisis Hasil Kualitatif

Berdasarkan hasil wawancara melalui *direct mail* dengan para responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Laporan keuangan yang disusun di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah, tepatnya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, sudah tergolong berkualitas karena laporan keuangan telah disusun secara tepat waktu, mudah dipahami, dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan disusun secara benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Prinsip-Prinsip yang berlaku yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sistem pencatatan akuntansi sudah disusun mengikuti Peraturan Pemerintah dengan berbasis Akrual yang mana menurut pernyataan responden bahwa “pengakuan akun pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas kedalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN”. Penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual sudah berjalan dengan baik, namun terkadang masih terdapat kendala karena adanya human error atau perbedaan pendapat dan pemahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah, tepatnya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII , juga telah memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan dengan baik. Tempat ini juga terdapat fasilitas pendukung teknologi informasi yang memadai seperti halnya internet dan komputer dengan sistem yang selalu diuprade, sehingga sangat menunjang sistem pelaporan keuangan yang ada. Secara rutin, kantor ini juga menyelenggarakan pembinaan guna menunjang kualitas SDM, seperti halnya penyuluhan, pelatihan, diklat, workshop terkait bidang-bidang pekerjaan yang ada serta selalu ada sosialisasi jika terdapat perubahan peraturan yang terbaru. Seluruh kegiatan yang ada, secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapan SAP berbasis Akrual.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini secara kuantitatif adalah

**Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia...
(Enita Binawati, Eni Dwi Susliyanti)**

1. Kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual,
2. Kualitas teknologi informasi terbukti berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan
3. Sistem akuntansi keuangan pemerintah terbukti berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Kesimpulan penelitian secara kualitatif adalah

Laporan keuangan yang disusun di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah DIY Jawa Tengah, tepatnya pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, sudah tergolong berkualitas karena laporan keuangan telah disusun secara tepat waktu, mudah dipahami, dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan disusun secara benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Prinsip-Prinsip yang berlaku yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sistem pencatatan akuntansi sudah disusun mengikuti Peraturan Pemerintah dengan berbasis Akrua. Penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual sudah berjalan dengan baik, namun terkadang masih terdapat kendala karena adanya human error atau perbedaan pendapat dan pemahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, telah memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan dengan baik dan telah mempunyai fasilitas pendukung teknologi informasi yang memadai sehingga sangat menunjang sistem pelaporan keuangan yang ada. Secara rutin, juga menyelenggarakan pembinaan guna menunjang kualitas SDM. Seluruh kegiatan yang ada, secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapan SAP berbasis Akrua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adventana, G.A dan Kurniawan, H. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010*. Jurnal Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014. Yogyakarta.
2. Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Versi Terjemahan)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
3. Hartono, Jogiyanto. 2008a. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Edisi I, Andi Offset: Yogyakarta.
4. Hartono, Jogiyanto dan Abdillah, Willy. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Patial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPFE: Yogyakarta.
5. Hair Jr., J.E., Anderson, R.E., Tatham R.L. & Back, W.C. 2010. *Multivariate data Analysis, 7th Ed.*, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).
7. Kusumo Ramadhani, G. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. <https://dspace.uui.ac.id/>
8. Marsdenia dan Mutiha. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual: Sebuah Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bogor*. Jurnal Vokasi Indonesia Vo.4 Nomor 2.
9. Peraturan Permerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

12. Sudiarianti, Ni Made dkk. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Jurnal. Bali

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

14. Yudha Kusuma, M.I dan Fuad. 2013. "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah*". Diponegoro Journal of Accounting". Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013. Semarang.